

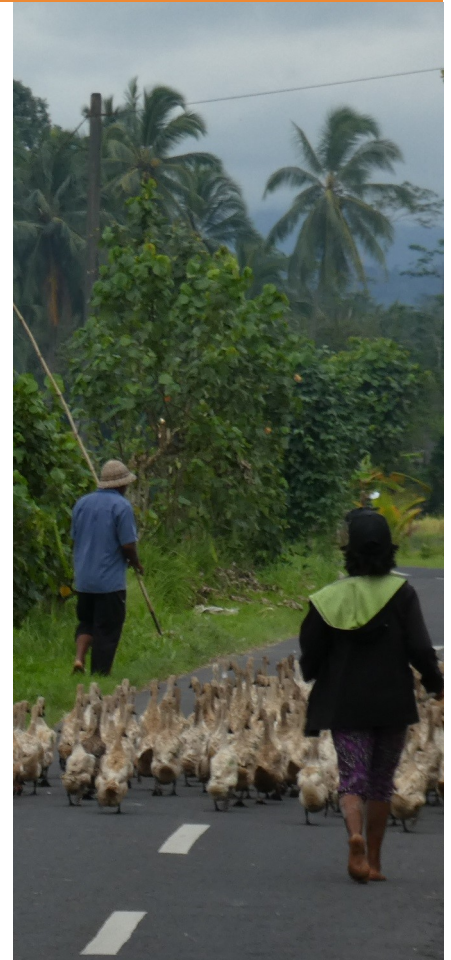
Banyaknya arti pertanian organik di Indonesia: Pelaku di pihak negara dan masyarakat sipil

Banyaknya arti pertanian organik di Indonesia untuk masyarakat sipil dan negara

Pertanian organik di Indonesia pada awalnya diadopsi oleh pelaku non-pemerintah, pertama oleh organisasi berbasis agama (1) dan kemudian oleh asosiasi petani kecil (2), sedangkan dukungan negara pada pertanian organik (3) terjadi setelah itu. Ketiga kelompok tersebut mengambil posisi berbeda sehubungan dengan definisi pertanian organik. Dengan membandingkan pemahaman mereka tentang pertanian organik, kami mengungkapkan banyaknya arti pertanian organik.

Kami mendasarkan temuan kami pada studi kasus komparatif, melihat ke dalam organisasi masyarakat sipil perintis, aliansi petani nasional, dan negara sebagai pelaku. Data tentang sejarah dan perspektif organisasi masyarakat sipil diperoleh melalui wawancara (tatap muka atau melalui tautan video) dan interaksi dengan anggota selama lokakarya yang diadakan pada tahun 2017. Semua ini dilengkapi dengan analisis konten terhadap publikasi organisasi dan dokumen internal. Data tentang negara diperoleh dengan meninjau dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan.

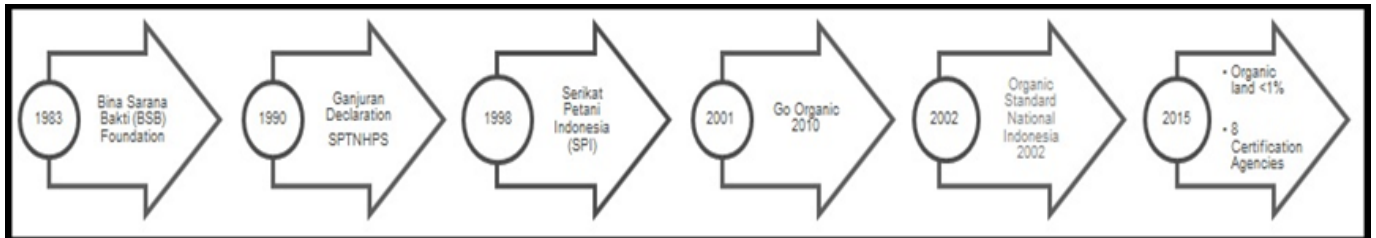
Untuk lembaga berbasis agama, pertanian organik adalah sebuah pandangan dunia spiritual dan filosofi praktis. Bagi serikat tani, pertanian organik adalah alat politik terpenting untuk melawan pertanian kapitalis global. Terlepas dari pandangan mereka yang sangat berbeda-beda, kedua jenis organisasi masyarakat sipil ini memandang pertanian organik sebagai bentuk usaha pasca-materialisme yang secara eksplisit diarahkan pada tujuan sosial-politik. Sebaliknya, keterlibatan pemerintah dalam pertanian organik, meskipun melibatkan bentuk gagasan seperti “kembali ke alam”, utamanya didorong oleh visi untuk mengembangkan ceruk pasar baru untuk ekspor Indonesia.



TOPIK

- Banyaknya arti pertanian organik di Indonesia untuk masyarakat sipil dan negara
- Beragam organisasi masyarakat sipil dan beragam cara sertifikasi
- Pandangan tentang perkembangan pertanian organik Indonesia di masa depan
- Rekomendasi untuk pendekatan pemerintah yang lebih inklusif

Di Indonesia, diskusi mengenai ketahanan pangan dan konsep yang berkaitan namun berbeda tentang kemandirian pangan dan kedaulatan pangan merupakan subjek untuk dipertentangkan. Walaupun negara Indonesia dan pelaku non-pemerintah memformulasikan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan secara normative, mereka memiliki pendapat dan cara yang berkaitan dengan bagaimana mereformasi sistem pangan negara. Kami menunjukkan bagaimana para pelaku dari gerakan pertanian organik mendefinisikan istilah tersebut dan bagaimana mereka berkaitan ataupun menyimpang dari wacana kebijakan pangan yang resmi.



GAMBAR 1:

Tonggak penting dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia.

Organisasi masyarakat sipil yang berbeda dan metode sertifikasi yang berbeda

Organisasi berbasis agama (1): Untuk organisasi berbasis agama yang diteliti dan didirikan pada tahun 1984, pertanian organik menggambarkan pandangan dunia yang mengacu pada agro-filosofi Asia dan konseptualisasi Fransiskan tentang manusia dan alam sebagai ciptaan Tuhan, di mana manusia dan makhluk bukan manusia adalah bagian dari suatu organisme. Hubungan antara kepercayaan agama dan environmentalisme adalah pendorong kuat transformasi praktik pertanian dan adopsi pertanian konservasi. Eko-teologi Muslim juga menginspirasi banyak orang Indonesia untuk terlibat aktif dalam perlindungan lingkungan. Namun demikian, tantangan oleh penganut 'Islam hijau' terhadap agenda pembangunan pemerintah sebagian besar masih diabaikan oleh negara.

Organisasi payung (2): Sebaliknya, untuk serikat petani, yang didirikan pada tahun 1998, pertanian organik adalah isu politik yang pertama dan utama: pertanian organik tidak dapat dipisahkan dari perlawanan politik. Secara khusus, pengadopsian pertanian organik adalah salah satu cara untuk melawan agribisnis global, dan bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk hak-hak petani, keadilan lingkungan, dan kedaulatan pangan. Serikat petani setuju dengan fokus pemerintah pada swasembada (nasional) dan penggunaan kebijakan perdagangan proteksionis untuk mencapai tujuan ini. Namun serikat petani tidak setuju dengan konseptualisasi negara yang mengarah pada produktivisme terkait kedaulatan pangan ini, dengan alasan bahwa kedaulatan atas kebijakan pertanian dan pangan perlu ditempatkan di tangan petani untuk menangani kerawanan pangan secara efektif. Serikat petani juga menolak gagasan produksi pertanian organik untuk pasar ekspor dan mengadvokasi "pertanian berkelanjutan berdasarkan pertanian keluarga".

Sikap serikat petani tentang sertifikasi konsisten dengan perspektif anti-kapitalisnya. Sertifikasi mandiri, yang pada prinsipnya juga didukung oleh lembaga, dan *Participatory Guarantee Schemes* (PGS) atau skema jaminan partisipatoris dapat menjadi alternatif yang layak untuk skema sertifikasi konvensional dalam situasi di mana hubungan produsen-konsumen sangat dekat, misalkan ketika produk dijual pada harga sawah/ladang pasca pemetikan.

Pendukung dari pendekatan ini berpendapat bahwa hal itu memupuk pertukaran pengetahuan dan dibangun atas dasar kepercayaan, berdasarkan pada keterlibatan langsung para pelaku. Di sisi lain, diklaim bahwa penghindaran konflik, free riding (penunggangan/pemboncengan gratis) dan keberpihakan, serta kendala waktu, dapat mengancam keberlanjutan skema PGS.

Negara Indonesia (3): Keterlibatan pemerintah dalam pertanian organik, meskipun menggunakan kata-kata seperti “kembali ke alam”, “holistik” dan “pengetahuan lokal”, tampaknya didorong terutama oleh visi mengembangkan ceruk pasar baru untuk ekspor Indonesia. Negara telah mengadopsi pendekatan kontradiktif, sehingga sulit untuk membingkai strategi yang konsisten untuk mendukung pertanian organik. Misalkan, langkah-langkah kebijakan membuat ketentuan untuk pelatihan pegawai negeri tentang teknik organik, tetapi tetap mempertahankan hasil panen sebagai tolok ukur utama. Di atas kertas, negara tampaknya terbuka untuk visi alternatif pertanian organik, tetapi orientasi produksi dan ekspor mendominasi kerangka kebijakan dan menyisakan sedikit ruang untuk keterlibatan konstruktif dengan pelaku non-pemerintah dan gagasan mereka yang berkembang tentang arti pertanian organik. Negara Indonesia memiliki kepentingan menyeluruh untuk mempertahankan kontrol atas sektor organik yang masih berkembang.

Sektor pertanian organik Indonesia tampaknya sangat terpecah-pecah, di mana secara bersamaan terdapat delapan badan sertifikasi nasional dan empat belas badan sertifikasi internasional. Lebih dari separuh dari yang disebut ‘tanah organik’ belum disertifikasi. Selain itu, karena produsen sering tidak memperpanjang sertifikasi mereka, angkanya sangat berbeda dari tahun ke tahun. Biaya sertifikasi bahkan dapat menghambat produsen kecil memasuki pasar organik formal yang sekarang membutuhkan sertifikasi. Meskipun demikian, negara Indonesia bermaksud memperluas sertifikasi resmi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sejauh ini menolak alternatif seperti sertifikasi mandiri atau PGS.

Pandangan tentang perkembangan pertanian organik Indonesia di masa depan

Perbedaan sikap yang diadopsi oleh pelaku dari pihak negara dan masyarakat sipil dalam gerakan pertanian organik akan mempengaruhi perkembangan pertanian organik di masa depan. Negara Indonesia memiliki kekuatan untuk mendefinisikan pertanian organik dalam istilah hukum dan peraturan. Definisi pertanian organik yang berdimensi tunggal dan dilatari produktivisme menyingkirkan perbedaan makna dan tradisi pertanian organik yang berbeda yang dipraktikkan oleh masyarakat sipil. Secara khusus, penyempitan arti ‘organik’ menjadi ‘produk bersertifikat organik’ menyingkirkan banyak petani yang menganggap mereka mempraktikkan pertanian organik dan definisi ini menjadikan ilegal bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka melakukan pertanian organik. Hal ini juga mendiskriminasi para petani yang dari awal sudah berpraktik secara organik, seperti misalnya di perladangan dataran tinggi di daerah terpencil di Indonesia dimana mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan pupuk sintetis.

Organisasi masyarakat sipil yang berbeda dan metode sertifikasi yang berbeda:

Organisasi berbasis agama (1) dan organisasi payung (2):

Dengan demikian, dua organisasi masyarakat sipil mendefinisikan pertanian organik dengan sangat berbeda dan mendapatkan inspirasi dari tradisi filosofis, politik, dan sosial-budaya yang berbeda. Namun keduanya melihat pertanian organik sebagai bentuk usaha pasca-materialisme yang secara eksplisit diarahkan pada tujuan sosial-politik.





Saat ini negara Indonesia mengeluarkan regulasi yang lebih terperinci dan badan pemerintahan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan tersebut, dan lembaga masyarakat membatasi posisi mereka dari agenda pemerintah. Petani skala kecil atau petani yang memiliki gagasan tentang pertanian organik secara berseberangan bertentangan dengan visi negara yang berorientasi ekspor masih mungkin terlibat dalam 'pertanian organik bawah tanah' tanpa izin untuk mempertahankan keyakinan mereka dalam praktik pertanian secara organik.

Sebagai otoritas yang berdaulat, negara menegaskan haknya untuk menentukan isi pertanian organik, menentukan batas-batasnya, dan memutuskan alasan untuk mendukungnya. Dengan bersikap demikian dari posisi kekuasaan yang istimewa, negara mendelegitimasi perbedaan pemahaman tentang pertanian organik dan perannya dalam bidang kebijakan lainnya. Menanggapi hal tersebut, pelaku dari masyarakat sipil mengadopsi penafsiran alternatif tentang kedaulatan sebagai hak suara dan kepentingan petani organik kecil. Terinspirasi oleh nilai-nilai spiritual dan humanis, hal ini melibatkan pergeseran perspektif dari pertimbangan murni ekologis menuju visi pertanian organik sebagai ungkapan kedaulatan petani, yang tidak terpisahkan dari perjuangan untuk mendapatkan akses pada tanah, pasar dan kondisi hidup dan kondisi kerja yang bermartabat.

Rekomendasi untuk pendekatan pemerintah yang lebih inklusif

1. Negara Indonesia harus melonggarkan regulasi pada sektor organik. Membiarkan adanya keterbukaan dan keragaman akan menciptakan ruang bagi inovasi dan kerja sama yang sangat dibutuhkan di antara berbagai pelaku yang terlibat. Negara akan menampilkan kedaulatan sejati dengan memberi ruang untuk debat terbuka dan inklusif tentang cara-cara di masa mendatang untuk pertanian organik di Indonesia.
2. Alih-alih mendamaikan ketegangan dalam kerangka yang berbeda seputar pertanian organik, negara dapat bekerja secara produktif dengan adanya gesekan ini yang merupakan sebagai hasil dari keanekaragaman arti yang melekat pada pertanian organik. Meskipun kebijakan tingkat kabupaten dan kecamatan jauh lebih fleksibel untuk mengakomodasi permintaan lokal untuk mendukung pertanian organik, ruang manuver mereka dibatasi oleh kebijakan pertanian dan pangan Indonesia yang pada umumnya bertentangan.
3. Kami mengusulkan pembentukan platform untuk debat dan wacana tentang masa depan pertanian organik di Indonesia, yang melibatkan agribisnis serta gerakan sosial serta sejumlah kecil orang dengan pandangan menyimpang, termasuk kelompok dan organisasi yang berpotensi berpengaruh, inovatif dan kuat. Perdebatan tentang bagaimana menciptakan versi yang beragam dan dilokalkan dari konstelasi nilai organik harus menyertakan nilai di luar perspektif pasar. Berpikir di luar perspektif ekonomi mungkin menawarkan aliansi dan strategi baru. Namun demikian, kehendak politik yang ada untuk mempromosikan pertanian organik adalah langkah maju yang menjanjikan.

IndORGANIC

Proyek penelitian IndORGANIC

Prof. Martina Padmanabhan

Ketua Kajian Perbandingan Pembangunan dan Budaya (Fokus: Asia Tenggara)

Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14b

94032 Passau, Jerman

Penulis: Martina Padmanabhan

Kontak: martina.padmanabhan@uni-passau.de

Passau, Januari 2020



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung